

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia, dengan kondisi geografisnya yang kaya akan sungai sebagai pusat kehidupan, memungkinkan masyarakat untuk tinggal dan bekerja di sepanjang tepian sungai. Fenomena ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, karena sungai dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan sumber daya alam yang mendukung kehidupan sehari-hari. Tepian sungai, atau yang sering disebut tepian air, memiliki berbagai keunggulan, terutama karena lokasinya yang strategis dan multifungsi. Manusia dapat berpindah dan membangun pemukiman baru, yang kemudian berkembang menjadi komunitas yang lebih padat, desa, dan akhirnya kota.

Pengelolaan kawasan sungai yang baik dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Kawasan sungai yang terkelola dengan baik dapat meningkatkan nilai ekonomi melalui berbagai cara, seperti pariwisata, transportasi, irigasi, dan energi. Selain itu, pengelolaan yang baik juga dapat mengurangi risiko banjir dan bencana alam, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penataan merujuk pada proses, cara, atau tindakan mengatur. Arti lain dari penataan adalah pengaturan. Sementara itu, kawasan secara umum diartikan sebagai suatu wilayah dengan kriteria tertentu yang membedakannya dari wilayah lain. Karakteristik ini dapat berupa aspek geografis, budaya, ekonomi, atau ciri khas lainnya. Kawasan juga sering memiliki batas-batas yang jelas, baik secara geografis maupun administratif (geograf.id).

Penataan kawasan (*waterfront development*) telah menjadi strategi utama dalam pembangunan perkotaan di berbagai belahan dunia, bertujuan untuk mentransformasi area yang terabaikan menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan rekreasi yang dinamis. Di Indonesia, negara dengan kekayaan hidrologis yang melimpah, sungai telah lama menjadi pusat kehidupan, namun urbanisasi yang pesat seringkali mengubah kawasan tepi sungai menjadi area kumuh dan terdegradasi. Sebagai respons, pemerintah di berbagai tingkatan semakin gencar

melakukan program revitalisasi untuk mengembalikan fungsi ekologis dan sosial sungai, sekaligus membuka potensi ekonomi baru.

Kota Payakumbuh memiliki luas wilayah sekitar 85,22 km<sup>2</sup>, yang setara dengan 0,20% dari total luas Provinsi Sumatera Barat (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019). Posisinya yang strategis menjadikan kota ini sebagai penghubung penting antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Di kota ini, terdapat tiga sungai besar yang mengalir, yaitu Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, dan Sungai Batang Sinamar, serta lima sungai kecil lainnya, yakni Sungai Batang Pulau, Sungai Talang, Sungai Baih, Sungai Batang Sikali, dan Sungai Tembok Jua. Sungai Batang Agam, yang berjarak sekitar 125 km dari Kota Padang (Putra et al., 2020), merupakan sungai terbesar di wilayah ini dengan panjang sekitar 15,6 km dan lebar 25 m (Peraturan Wali Kota Payakumbuh No. 3 Tahun 2022). Sungai ini melintasi empat kecamatan (Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, dan Payakumbuh Utara) serta sebelas kelurahan di Kota Payakumbuh.

Masyarakat menggunakan daerah sekitar Sungai Batang Agam untuk pertanian, perikanan, pertambangan pasir dan kegiatan lainnya. Namun, sayangnya kegiatan ini sering disertai dengan perilaku negatif seperti pembuangan limbah rumah tangga dan bahkan limbah industri produksi tahu ke dalam sungai, yang mengancam keberlangsungan sungai tersebut. Hal ini menyebabkan penyempitan, pendangkalan, pencemaran, dan bahkan kerusakan ekosistem Sungai Batang Agam. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan analisis, perencanaan, dan survei lapangan yang kemudian dilanjutkan dengan Penataan Kawasan Batang Agam.

Melalui proyek penataan Kawasan Batang Agam, merupakan salah satu contoh ambisius dari upaya transformasi ini. Sebelum penataan, Kawasan Batang Agam dikenal sebagai "halaman belakang kota" (*water back of the city*), identik dengan kondisi kumuh, rawan banjir dan longsor, serta menjadi lokasi pembuangan limbah domestik. Menyadari potensi strategisnya, Pemerintah Kota Payakumbuh menggagas sebuah visi besar untuk mengubah paradigma tersebut. Proyek penataan ini bukan sekadar normalisasi sungai, melainkan sebuah intervensi strategis untuk merekayasa ulang geografi ekonomi kota, dengan tujuan menjadikan Batang Agam

sebagai "halaman depan" atau "etalase kota" (*riverfront city*). Visi ini sejalan dengan agenda Walikota Payakumbuh saat itu, Riza Falepi, untuk mentransformasi Payakumbuh dari "kota tumbuh" menjadi "kota terencana". Hal ini dilakukan sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memperkuat daerah aliran sungai ( DAS ), mencegah banjir dan longsor sekaligus meningkatkan ruang terbuka hijau ( RTH ) serta meningkatkan fasilitas infrastruktur di kawasan tersebut. Hal ini tergambar dari pembangunan fisik infrastruktur penataan kawasan Batang Agam dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2019, dengan jarak 3,85 kilometer, dengan anggaran kurang lebih 169 miliar ( Dinas PUPR Kota Payakumbuh ). Proyek ini merupakan hasil kerja sama strategis antara Pemerintah Kota Payakumbuh yang bertanggung jawab atas pembebasan lahan, dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS V) yang melaksanakan konstruksi fisik. Keterlibatan pemerintah pusat ini mengindikasikan bahwa penataan Batang Agam dipandang sebagai proyek prioritas yang sejalan dengan agenda nasional dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur. Untuk tahap awal penataan kawasan dilakukan di Kecamatan Payakumbuh barat dan 3 kelurahan yaitu : Pakan Sinayan, Tanjung Pauh, dan Tanjuanggadang Sungai Pinago. Sementara untuk daerah kecamatan dan kelurahan lain masih dalam tahap perencanaan dan pembebasan lahan. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan daerah Kota Payakumbuh karena ingin mengembangkan kawasan batang agam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus etalase kota ( Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang RPJMD Perubahan Kota Payakumbuh 2017-2022 ).

Penataan kawasan sungai telah menjadi salah satu pendekatan yang diterapkan di berbagai daerah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program revitalisasi dan penataan kawasan sungai dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Misalnya, penelitian oleh Bappenas (2020) menunjukkan bahwa penataan kawasan sungai yang berorientasi pada pendekatan ekowisata dan ekonomi kreatif mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi dampak lingkungan negatif.

Transformasi fisik yang dihasilkan sangat signifikan: kawasan yang dulunya terabaikan kini menjadi ruang terbuka hijau (RTH), pusat olahraga (sport center), dan ruang interaksi sosial yang ramai dikunjungi masyarakat. Fenomena ini secara langsung membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kuliner dan jasa. Namun, keberhasilan sebuah proyek infrastruktur publik tidak dapat diukur dari perubahan fisik semata. Pertanyaan krusial yang muncul adalah: apakah transformasi fisik ini secara nyata berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya para pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut.

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa penataan kawasan sungai dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial, kajian spesifik yang menganalisis mekanisme dampak penataan Kawasan Batang Agam terhadap kesejahteraan masyarakat lokal masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif faktor-faktor penataan kawasan yaitu peraturan zonasi, ketersediaan infrastruktur, dan kualitas lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan memahami mekanisme ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berbasis bukti bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

## **B. Rumusan Masalah**

Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh memiliki ekspektasi bahwa penataan kawasan tersebut akan berfungsi sebagai pusat ekonomi baru dan etalase kota yang dapat meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dari gambaran umum pertumbuhan ekonomi kota tadi kita mengambil studi kasus khusus untuk daerah terdampak kebijakan penataan kawasan Batang Agam. untuk Berdasarkan latar belakang tadi, maka dirumuskan dua masalah :

1. Apakah penataan kawasan batang agam dengan peraturan zonasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan secara signifikan berpengaruh terhadap probabilitas peningkatan pendapatan pelaku usaha di sekitar Kawasan Batang Agam ?



2. Faktor dominan apa yang mempengaruhi peningkatan pendapatan menurut persepsi dan pengalaman para pelaku usaha ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh statistik dari variabel peraturan zonasi, infrastruktur, dan kualitas lingkungan terhadap probabilitas peningkatan pendapatan pelaku usaha di Kawasan Batang Agam.
2. Mengeksplorasi dan memahami persepsi serta pengalaman para pelaku usaha dan pemangku kebijakan untuk menjelaskan temuan statistik mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi: Memberikan kontribusi pada literatur studi pembangunan perkotaan, khususnya mengenai evaluasi dampak proyek waterfront development di kota-kota menengah di negara berkembang dengan menggunakan pendekatan metode campuran.
2. Bagi Pemerintah dan Pengambil Kebijakan: Menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dan pemerintah daerah lainnya dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola proyek penataan kawasan tepi sungai agar lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi Masyarakat: Menjadi sarana untuk menyuarakan persepsi dan pengalaman masyarakat terkait proyek pembangunan, sehingga dapat mendorong perencanaan yang lebih partisipatif dan inklusif di masa depan.

### **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, baik dari individu maupun kelompok, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat, yang berisi

pertanyaan dengan pilihan jawaban menggunakan skala nominal dan Likert. Responden yang menjadi sumber kuisioner dan wawancara adalah para pelaku usaha yang melaksanakan aktifitas perdagangan di sepanjang Kawasan Batang Agam dari Jalan Sutan Syahrir sampai Jalan Hasanudin. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan beberapa pelaku usaha yang menjadi responden guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Data primer tambahan diperoleh melalui wawancara dengan dinas atau instansi terkait yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini memiliki sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup dan batasan penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengemukakan landasan teori terkait dengan topik penelitian; penelitian terdahulu; dan kerangka pemikiran penelitian.

##### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan mendeskripsikan data, serta metodologi penelitian yang akan dilakukan.

##### **BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH**

Bab ini akan menggambarkan lokasi objek penelitian dan wilayah administrasinya.

##### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan mendeskripsikan hasil, pengolahan data, serta analisis pembahasannya.

##### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan mencakup kesimpulan dan saran atau masukan untuk pengambil kebijakan.